

ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI AKHIR PEKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA DI KOTA SEMARANG

Anisa Hayyu Zumarnis* dan Dwi Haryati**

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi inovasi Pelayanan Publik Terpadu Akhir Pekan dan Malam Hari di Kota Semarang, mengevaluasi capaiannya dalam peningkatan aksesibilitas layanan bagi masyarakat, serta mengidentifikasi persoalan perlindungan hukum terhadap hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat. Inovasi ini diinisiasi sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat yang terkendala waktu pada jam kerja konvensional dan sejalan dengan visi reformasi birokrasi.

Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif-empiris, dengan menggabungkan studi kepustakaan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait dan wawancara mendalam terhadap 28 responden masyarakat di Kecamatan Banyumanik dan Gajahmungkur, serta ASN terkait. Data sekunder dari laporan pemerintah daerah juga dikumpulkan untuk mendukung analisis. Fokus analisis mencakup persepsi masyarakat terhadap kemudahan akses dan manfaat layanan, tren partisipasi pengguna, serta kesesuaian kompensasi ASN sebagai pelaksana inovasi dengan peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi ini berhasil meningkatkan aksesibilitas dan kepuasan masyarakat, dengan sekitar 89,29% dari 28 responden merasa sangat terbantu. Namun, terjadi tren penurunan jumlah pengguna layanan kependudukan setiap bulannya di kedua kecamatan, yang diindikasikan sebagai penurunan *real demand* di masyarakat. Lebih krusial, hak upah lembur ASN tidak terlindungi secara nyata, dengan hanya menerima uang transportasi tanpa kompensasi lembur sesuai PMK. Ada fleksibilitas dalam pengaturan *shift* yang mengurangi paksaan mutlak terhadap hak atas istirahat. Namun demikian, ketiadaan regulasi teknis yang komprehensif menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas perlakuan kepada ASN yang bertugas.

Kata Kunci: Inovasi Pelayanan Publik, *Public Value*, Hak ASN, Kota Semarang, Efektivitas Pelayanan.

* Mahasiswa Departemen Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

** Dosen Departemen Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

LEGAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC SERVICE INNOVATION ON WEEKENDS BY CIVIL SERVANTS IN THE CITY OF SEMARANG

Anisa Hayyu Zumarnis* and Dwi Haryati**

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Integrated Weekend and Night Public Services innovation in Semarang City, evaluating its achievements in enhancing public service accessibility, and identifying legal protection issues concerning the rights of civil servants (ASN) involved. This innovation was initiated in response to the needs of the public who face time constraints during conventional working hours and aligns with the vision of bureaucratic reform.

The research employed a normative-empirical approach, combining library study to analyze relevant legislation and in-depth interviews with 28 community respondents in Banyumanik and Gajahmungkur sub-districts, as well as relevant civil servants. Secondary data from local government reports were also collected to support the analysis. The analysis focused on public perception of service accessibility and benefits, trends in user participation, and the compliance of ASN compensation with applicable regulations.

The findings indicate that this innovation successfully improved public accessibility and satisfaction, with approximately 89.29% of the 28 respondents reporting significant benefit. However, there is a decreasing trend in the number of civil registration service users each month in both sub-districts, interpreted as a decline in real demand and potentially due to a lack of continuous promotion. More critically, civil servants' overtime pay rights are explicitly unprotected, as they only receive transportation allowances without proper overtime compensation as per existing regulations. While flexibility in shift arrangements mitigates absolute coercion regarding right to rest, the absence of comprehensive technical regulations leads to legal uncertainty and disparities in treatment for the assigned civil servants.

Keywords: *Public Service Innovation, Public Value, Civil Servant Rights, Semarang City, Service Effectiveness*

* Student of the Department of State Administrative Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta

** Lecturer of the Department of State Administrative Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta